

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian yang Digunakan

3.1.1 Objek Penelitian

Objek adalah apa yang akan diselidiki selama kegiatan penelitian. Objek penelitian dilakukan untuk mendapatkan jawaban atau solusi dari permasalahan yang terjadi.

Menurut Muh. Fitrah (2017:156) objek penelitian adalah:

“Objek penelitian adalah dasar dari persoalan dan atau yang menjadi titik perhatian suatu penelitian yang kemudian hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah.”

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Perolehan Opini Audit Pemerintah pada Pemerintah Daerah Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif dengan penelitian survey.

Menurut Sugiyono (2019:16) metode kuantitatif adalah:

“Metode penelitian Kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.”

Menurut Sugiyono (2019:57) metode penelitian survey adalah:

“pendekatan survei adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variabel dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu, teknik pengumpulan data dengan pengamatan (wawancara atau kuesioner) yang tidak mendalam, dan hasil penelitian cenderung untuk digeneralisasikan.”

Tujuan penelitian survey adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, serta karakter-karakter yang khas dari kasus atau kejadian suatu hal yang bersifat umum.

3.1.2 Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggambarkan pendekatan penelitian dengan menerapkan metode deskriptif dan verifikatif dengan penelitian studi empiris.

Menurut Sugiyono (2019:64) bahwa metode deskriptif adalah:

“Metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik hanya dari satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri). Dalam penelitian ini peneliti tidak membuat perbandingan variabel itu dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain.”

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif untuk mengetahui bagaimana penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Bandung, Kota Bandung dan Kota Cimahi

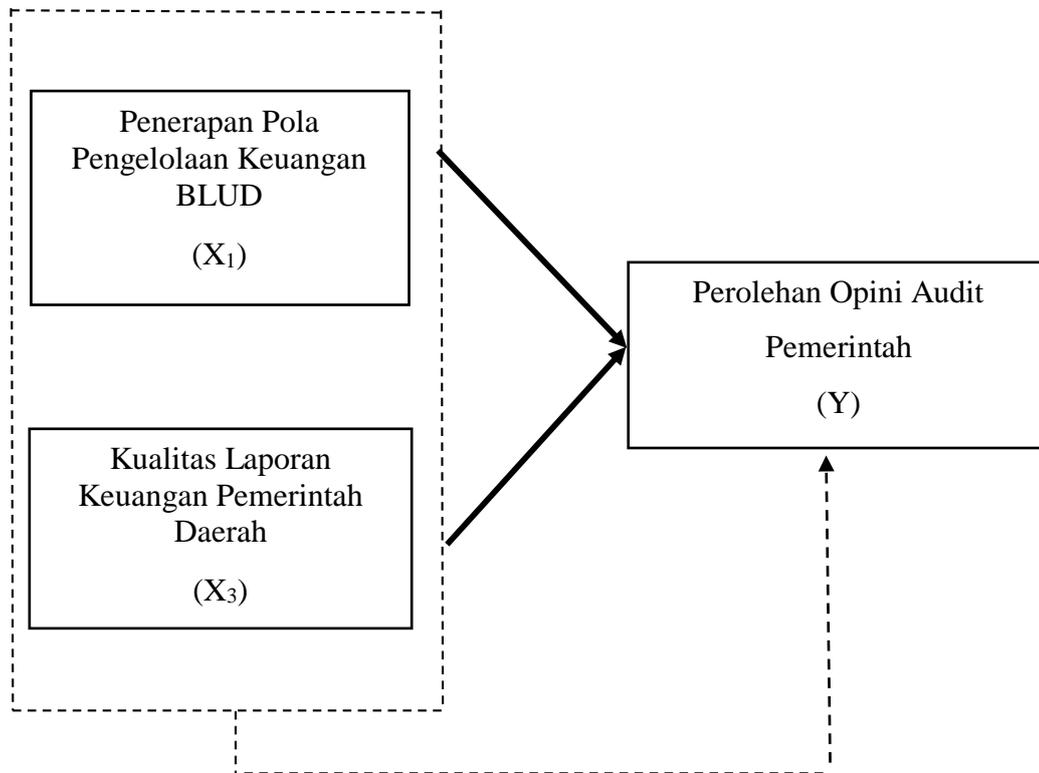
Sedangkan metode verifikatif menurut Tehubijuluw Zacharias (2019:98) adalah sebagai berikut:

“Metode verifikatif adalah metode yang bertujuan untuk menguji kebenaran dan pengetahuan, atau disebut pula penelitian yang bertujuan menguji hipotesis, yaitu menguji adanya hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih yang telah dirumuskan sebagai hipotesis,”

Dalam penelitian ini metode verifikatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah bagaimana Pengaruh Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah baik secara parsial maupun simultan terhadap Perolehan Opini Audit Pemerintah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Kota Bandung dan Kota Cimahi dengan dilakukan uji hipotesis yaitu dengan uji t (parsial) dan uji f (simultan).

3.1.3 Model Penelitian

Model penelitian ini merupakan abstraksi dari fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Dalam hal ini sesuai dengan judul skripsi yang penulis kemukakan yaitu: “Pengaruh Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah terhadap Perolehan Opini Audit Pemerintah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Kota Bandung dan Kota Cimahi”. Maka untuk menggambarkan hubungan antara variabel independen dan dependen, penulis memberikan model penelitian yang ditanyakan sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Model Penelitian

Keterangan:

Garis \longrightarrow menunjukkan pengaruh secara parsial

Garis \dashrightarrow menunjukkan pengaruh secara simultan

Bila digambarkan dalam bentuk matematis, yaitu sebagai berikut:

$$Y = f(X_1, X_2)$$

Keterangan:

X₁ = Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

X₂ = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Y = Perolehan Opini Audit Pemerintah

f = Fungsi

3.2 Definisi Variabel dan Operasional Variabel Penelitian

3.2.1 Definisi Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2019:68) variabel penelitian adalah sebagai berikut:
“Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Dalam sebuah penelitian variabel dibedakan menjadi dua variabel utama yaitu variabel independen (variabel bebas) dan variabel dependen (variabel terikat)

3.2.1.1 Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel bebas (*independent*) merupakan variabel yang dapat mempengaruhi variabel lainnya atau sebagai sebab dari perubahan timbulnya variabel terikat.

Menurut Sugiyono (2019:69) variabel independen adalah:

“Variabel independen sering disebut sebagai variabel stimulus, *predictor*, *antecedent*. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terkait).”

Pada penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel independen yang diteliti yaitu Penerapan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3.2.1.1.1 Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah menjelaskan Badan Layanan Umum Daerah, Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK BLUD) merupakan pola pengelolaan keuangan yang dikecualikan dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dengan diberikannya keistimewaan berupa fleksibilitas dalam hal pengelolaan keuangan.

Fleksibilitas memberikan kelonggaran untuk dapat mempraktikkan praktek bisnis yang sehat tanpa mencari keuntungan yang bertujuan untuk menambah layanan pada masyarakat dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa Penyelenggaraan praktek bisnis yang sehat memiliki tujuan untuk memberikan layanan yang bermutu pada masyarakat, berkesinambungan serta berdaya saing dengan memperhatikan kaidah-kaidah manajemen yang baik.

3.2.1.1.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Erlina Rasdianto (2013:146):

“Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak yang memerlukan.”

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka laporan keuangan tersebut harus memiliki karakteristik kualitatif. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan

bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran normatif yang perlu diwujudkan, sehingga memenuhi tujuannya, antara lain:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan:

- a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c) Tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan
- d) Lengkap Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- a) Penyajian Jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b) Dapat Diverifikasi (*verifiability*) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- c) Netralitas Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika

- a. dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

- b. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.
 - c. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

3.2.1.2 Variabel Dependen (Y) Perolehan Opini Audit Pemerintah

Menurut Sugiyono (2019:69) variabel dependen adalah:

“Variabel dependen sering juga disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.”

Variabel ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari variabel Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

BPK memiliki kriteria-kriteria pemberian opini WTP terdiri dari 4 standarisasi opini WTP diantaranya:

1. Laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dalam hal ini sesuai dengan PP 71 tahun 2010 (sebelumnya PP 24 tahun 2005).
2. Adanya kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*).
3. Adanya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Adanya efektivitas sistem pengendalian intern (SPI) yang tercantum dalam PP No. 60 tahun 2008.

BPK dapat memberikan empat jenis opini atas Laporan Keuangan Pemerintah:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion* diberikan dengan kriteria:
 - a) Sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan.
 - b) Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP.
2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion* diberikan dengan kriteria:

- a. pengendalian internal memadai
- b. terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan.

Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan.

3. Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*

diberikan jika

- a. pengendalian internal tidak memadai dan
- b. terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material.
- c. secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

4. Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau (*disclaimer of opinion*)

Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

3.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Operasionalisasi variabel adalah suatu cara untuk mengukur suatu konsep yang dalam hal ini terdapat variabel-variabel yang langsung mempengaruhi dan dipengaruhi, yaitu variabel yang dapat menyebabkan masalah-masalah lain terjadi dan atau variabel yang situasi dan kondisinya tergantung variabel lain.

Macam-macam skala pengukuran dapat berupa: skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio, dari skala pengukuran itu akan diperoleh data nominal, ordinal, interval dan rasio (Sugiyono, 2019:146). Penelitian ini menggunakan ukuran ordinal. Agar lebih mudah melihat mengenai variabel penelitian yang akan digunakan, maka penulis menjabarkannya kedalam sebuah tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Operasionalisasi Variabel

Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah(X₁)

Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	Instrumen
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Merupakan pola pengelolaan keuangan yang dikecualikan dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dengan diberikannya keistimewaan berupa fleksibilitas dalam hal pengelolaan	Implementasi Kebijakan			
	1. Komunikasi	1. Adanya sosialisasi penerapan PPK BLUD	Ordinal	Kuisisioner No.1
	2. Koordinasi	1. Adanya koordinasi internal atau lintas sektoral dalam Penerapan PPK BLUD	Ordinal	Kuisisioner No. 2-3

<p>keuangan. Fleksibilitas memberikan kelonggaran untuk dapat mempraktikkan praktek bisnis yang sehat tanpa mencari keuntungan yang bertujuan untuk menambah layanan pada masyarakat dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa</p> <p>Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah</p>	<p>Langkah-Langkah Penerapan PPK BLUD</p> <p>1. Pengelolaan Keuangan</p> <p>2. Penyusunan Laporan Keuangan</p>	<p>1. Pengelolaan Pendapatan</p> <p>2. Pengelolaan Belanja</p> <p>3. Pengelolaan Tarif</p> <p>4. Pengelolaan Utang dan Piutang</p> <p>5. Pengelolaan Barang dan Jasa</p> <p>6. Pengelolaan Pegawai</p> <p>7. Pengelolaan Barang</p> <p>8. Pengelolaan Investasi dan Kerjasama</p> <p>9. Remunerisasi</p> <p>10. Dewan Pengawas</p> <p>11. SILPA BLUD</p> <p>1. Sesuai SAP yang berlaku</p> <p>2. Ketepatan Waktu</p>	<p>Ordinal</p>	<p>Kuisisioner No. 4-15</p> <p>Kuisisioner No. 16-17</p>
---	--	--	----------------	--

Sumber: Data Diolah Penulis, 2022)

Tabel 3. 2
Operasionalisasi Variabel
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (X₂)

Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	Instrumen
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kualitas laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna dan berkualitas untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	Karakteristik Kualitatif Informasi			
	1. Relevan	a. Memiliki manfaat umpan balik b. Memiliki manfaat prediktif c. Tepat waktu d. Lengkap	Ordinal	Kuisisioner No. 18-22
	2. Andal	a. Penyajian jujur b. Dapat diverifikasi c. Netralitas	Ordinal	Kuisisioner No. 23-26
	3. Dapat dibandingkan	a. Sebagai pengukuran kinerja instansi antara selama periode berjalan dengan periode sebelumnya b. Dapat dibandingkan acuan dalam membandingkan kinerja dengan instansi pemerintah	Ordinal	Kuisisioner No. 27-30
	4. Dapat Dipahami	a. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah dimengerti oleh pengguna	Ordinal	Kuisisioner No. 31-32

		b. Dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman pengguna.		
--	--	--	--	--

Sumber: Data Diolah Penulis, 2022)

Tabel 3.3
Operasionalisasi Variabel

Perolehan Opini Audit Pemerintah (X₂)

Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	Instrumen
<p>Perolehan opini Audit Pemerintahan</p> <p>opini merupakan pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria</p> <p>Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara</p>	kriteria-kriteria pemeberian Opini			
	<p>1. Kesesuaian laporan keuangan pemerintah daerah dengan standar akuntansi pemerintah an (SAP)</p> <p>2. Kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosure</i>).</p>	<p>a. Berdasarkan asumsi dasar</p> <p>b. Memuat karakteristik laporan keuangan</p> <p>c. Berdasarkan prinsip akuntansi dan pelaporan</p> <p>d. Memuat unsur-unsur laporan keuangan</p> <p>a. Informasi tentang kebijakan</p> <p>b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan</p> <p>c. Dasar penyusunan laporan keuangan</p> <p>d. Kebijakan-kebijakan akuntansi</p> <p>e. Informasi wajib sesuai.</p>	<p>Ordinal</p> <p>Ordinal</p>	<p>Kuisisioner No. 33-36</p> <p>Kuisisioner No. 37-43</p>

	<p>3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.</p>	<p>f. Informasi pos-pos aset dan kewajiban</p> <p>g. Informasi tambahan</p> <p>a. Ketentuan penyajian informasi keuangan secara bruto (asas bruto)</p> <p>b. Ketentuan bahwa belanja merupakan pagu maksimal dan pendapatan adalah target yang harus dicapai</p> <p>c. Ketentuan pengungkapan bahwa penjelasan atas selisih anggaran dan realisasi yang signifikan</p> <p>d. Ketentuan penerimaan dan pengeluaran kas harus diadministrasikan dalam anggaran</p>	Ordinal	Kuisisioner No. 44-47
	<p>4. Efektivitas Pengendalian Internal</p>	<p>a. Pengendalian pencatatan akuntansi.</p> <p>b. Pengendalian pelaporan keuangan</p> <p>c. Pengendalian pemungutan dan penyetoran penerimaan daerah</p> <p>d. Pengendalian pelaksanaan anggaran</p>	Ordinal	Kuisisioner No. 48-52

		pendapatan dan belanja e. Struktur pengendalian intern		
	PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah			

Sumber: Data Diolah Penulis, 2022)

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi Penelitian

Peneliti diharuskan untuk menentukan populasi yang menjadi objek atau subjek penelitian. Kata populasi sendiri dalam statistika merujuk pada sekumpulan individu dengan karakteristik khas yang menjadi perhatian dalam suatu (pengamatan).

Menurut Sugiyono (2017:80) populasi adalah:

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek/objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.”

Dilihat dari uraian di atas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Bidang-bidang yang terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Tabel 3. 4
Populasi penelitian

No	Nama Pemerintah Daerah	Nama Instansi/Bagian	Populasi
1	Kabupaten Bandung	BKAD Bidang akuntansi dan Pelaporan	16 Orang
		Dinas Kesehatan Sub Bagian Keuangan	9 Orang
2	Kota Bandung	BPKA Bidang Akuntansi	20 Orang
		Dinas Kesehatan Sub Bagian Keuangan	10 Orang
3	Kota Cimahi	BPKAD Bidang Akuntansi	14 Orang
		Dinas Kesehatan Sub Bagian Keuangan	7 Orang
Jumlah			76 Orang

3.3.2 Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2017:217) Teknik *sampling* sebagai berikut:

“Teknik *sampling* merupakan Teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik *sampling* yang digunakan.”

Dalam penelitian ini, teknik *sampling* yang digunakan oleh penulis adalah teknik *Nonprobability sampling* dengan menggunakan metode *Sampling Purposive*.

Menurut Sugiyono (2017:84) *nonprobability sampling* sebagai berikut:

“*Nonprobability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.”

Menurut Sugiyono (2017:84) *sampling purposive* sebagai berikut:

“*Sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.”

Pada penelitian ini penulis menggunakan sampel *purposive*, yaitu merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, sehingga data yang diperoleh lebih *representative* dengan melakukan proses penilaian kepada objek penelitian yang kompeten dibidangnya. Adapun kriteria yang ditentukan sebagai pertimbangan dalam penelitian ini yaitu:

Menurut Sugiyono (2017:84) *nonprobability sampling* sebagai berikut:

“*Nonprobability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.”

Menurut Sugiyono (2017:84) *sampling purposive* sebagai berikut:

“*Sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.”

Pada penelitian ini penulis menggunakan sampel *purposive*, yaitu merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, sehingga data yang diperoleh lebih *representative* dengan melakukan proses penilaian kepada objek

penelitian yang kompeten dibidangnya. Adapun kriteria yang ditentukan sebagai pertimbangan dalam penelitian ini yaitu:

1. Instansi Terkait Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
2. Instansi yang mengizinkan penulis melakukan penelitian.
3. Pegawai bekerja pada bagian yang berhubungan dengan akuntansi dan pelaporan keuangan
4. Memiliki pengalaman melakukan penyusunan laporan keuangan minimal 3 tahun periode

Tabel 3. 5
Purposive Sampling

Kriteria Sampel	Jumlah
Instansi	6
Tidak memenuhi kriteria 1: Instansi Terkait Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	(0)
Tidak memenuhi kriteria 2: Instansi yang tidak mengizinkan melakukan penelitian	(0)
Instansi yang dapat dijadikan sampel	6
Jumlah pegawai di Instansi tempat penelitian	76
Tidak memenuhi kriteria 3: Pegawai tidak bekerja pada bagian yang berhubungan dengan akuntansi dan pelaporan keuangan	(0)
Tidak memenuhi kriteria 4:	(22)

Memiliki pengalaman melakukan penyusunan laporan keuangan minimal 3 tahun periode	
Pegawai yang dapat dijadikan sampel penelitian	54

3.3.3 Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:81) pengertian sampel penelitian adalah sebagai berikut:

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu teknik untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Untuk menentukan besarnya sampel bisa dilakukan dengan teknik untuk atau berdasarkan estimasi penelitian. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, dengan istilah lain harus teknik representative (mewakili).”

Berdasarkan populasi dan teknik *sampling* tersebut, maka yang menjadi sampel penelitian adalah pegawai yang bekerja pada bagian akuntansi atau pelaporan keuangan PPK BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tabel 3. 6
Sampel Penelitian

No.	Nama Instansi	Jumlah Pegawai	Perhitungan	Jumlah Auditor berdasarkan kriteria.
Kabupaten Bandung				
1.	BKAD Bidang Akuntansi	16 Pegawai	$\frac{16}{76} \times 54$	11
2.	Dinas Kesehatan Sub Bagian Keuangan	9 Pegawai	$\frac{9}{76} \times 54$	6
Kota Bandung				
3.	BPKA Bidang Akuntansi	20 Pegawai	$\frac{20}{76} \times 54$	14
4.	Dinas Kesehatan Sub Bagian Keuangan	10 Pegawai	$\frac{10}{76} \times 54$	7

Kota Cimahi					
5.	BPKAD Bidang Akuntansi	14 Pegawai	$\frac{14}{76} \times 54$	10	
6.	Dinas Kesehatan Sub Bagian Keuangan	7 Pegawai	$\frac{7}{76} \times 54$	6	
	Jumlah	76 Pegawai		54 Pegawai	

3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung.

Menurut Sugiyono (2019:194) data primer adalah:

“Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.”

Data primer tersebut diperoleh dari hasil pengumpulan data berupa penyebaran kuisioner kepada responden pada pegawai di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi.

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2019:296) menyatakan bahwa:

“Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.”

Untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini, peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan teknik penelitian lapangan (*Field*

Research) yaitu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data primer. Agar mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui kuesioner.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Dalam penelitian ini pihak yang terkait adalah Bagian Akuntansi dan Laporan Keuangan pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dinas Kesehatan Kota Cimahi, BPKA Kota Bandung, BKAD Kabupaten Bandung dan BPKAD Kota Cimahi.

b. Kuesioner (Angket)

Menurut Sugiyono (2019:199) kuesioner adalah:

“Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk di jawabnya. Kuesioner dapat berupa pertanyaan/ pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet.”

c. Observasi (*Observation*)

Peneliti melakukan survey terhadap tempat yang akan diteliti yaitu pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dinas Kesehatan Kota Cimahi, BPKA Kota Bandung, BKAD Kabupaten Bandung dan BPKAD Kota Cimahi. *Online Research*

Penulis untuk memperoleh berbagai data dan informasi tambahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui situs-

situs yang berhubungan dengan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

3.5 Rancangan Analisis Data dan Uji Hipotesis

3.5.1 Rancangan Analisis Data

Rancangan analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Sugiyono (2019:206) menyatakan bahwa:

“Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.”

Setelah data yang ada terkumpul, kemudian data tersebut dianalisis menggunakan teknik pengelolaan data. Teknik pengelolaan data pada penelitian ini menggunakan metode metode analisis statistik dengan menggunakan program *Statistical Package for Social Sciences (SPSS)*.

3.5.1.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

3.5.1.1.1 Uji Validitas Instrumen

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah alat ukur dapat digunakan untuk mengukur apa yang perlu diukur. Validitas menunjukkan derajat ketetapan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti.

Menurut Sugiyono (2019:175) validitas adalah:

“Validitas adalah instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.”

Dalam penelitian ini alat ukur yang digunakan adalah kuesioner. Untuk menguji validitas dalam penelitian ini digunakan analisis item, yaitu dengan mengkorelasikan skor dari setiap pertanyaan dengan skor total seluruh pertanyaan. Untuk memenuhi itu dibutuhkan syarat. syarat tersebut menurut Sugiyono (2019:180) yaitu:

- a. Jika memiliki koefisien korelasi $r > 0,3$ maka dinyatakan valid
- b. Jika memiliki koefisien korelasi $r < 0,3$ maka dinyatakan tidak valid

Maka dalam mencari nilai korelasi, maka penulis menggunakan rumus pearson product moment, dengan rumus sebagai berikut:

$$r = \frac{n\sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{\{n\sum x_i^2 - (\sum x_i)^2\}\{n\sum y_i^2 - (\sum y_i)^2\}}}$$

Keterangan:

r = Koefisien korelasi product moment

n = Jumlah responden

$\sum X_i Y_i$ = Jumlah perkalian variabel X dan Y

$\sum X$ = Jumlah nilai variabel X (Independen)

$\sum Y$ = Jumlah nilai variabel Y (Dependen)

$\sum X^2$ = Jumlah pangkat dua nilai variabel X

ΣY^2 = Jumlah pangkat dua nilai variabel Y

3.5.1.1.2 Uji Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas digunakan untuk membuktikan konsistensi dan stabilitas instrumen pengukuran. Sugiyono (2019:176) mengatakan instrumen reliabilitas yaitu:

“Instrumen reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.”

Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pernyataan. Adapun kriteria untuk menilai reliabilitas instrumen penelitian ini sebagai berikut:

- a. Jika nilai Alpha ≥ 0.6 maka instrument bersifat reliabel.
- b. Jika nilai Alpha ≤ 0.6 maka instrument tidak bersifat reliabel.

Maka koefisien korelasi di masukan ke dalam rumus Spearman Brown sebagai berikut:

$$r_1 = \frac{2r_b}{1 + r_b}$$

Keterangan:

r_i = Reliabilitas internal seluruh instrument

r_b = Korelasi Product moment antara belahan pertama dan kedua

3.5.1.2 Transformasi Data Ordinal Menjadi Interval

Mentransformasikan data ordinal menjadi data interval gunanya untuk memenuhi sebagian dari syarat dianalisis parametric yang mana data setidaknya tidaknya berskala interval. Teknik transformasi yang paling sederhana dengan menggunakan *MSI (Method of Successive Interval)* (Bambang Sudaryana 2022:57). Langkah-langkah transformasi data ordinal ke data interval sebagai berikut:

- a. Pertama perhatikan setiap butir jawaban responden dari angket yang disebarkan.
- b. Pada setiap butir ditentukan berapa orang yang mendapat skor 1,2,3,4 dan 5 yang disebut sebagai frekuensi.
- c. Setiap frekuensi dibagi dengan banyaknya responden dan hasilnya disebut proporsi.
- d. Tentukan nilai proporsi kumulatif dengan jalan menjumlahkan nilai proporsi secara berurutan perkolom skor.
- e. Gunakan tabel distribusi normal, dihitung nilai Z untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh.
- f. Tentukan nilai tinggi densitas untuk setiap nilai Z yang diperoleh (dengan menggunakan table tinggi desitas).
- g. Tentukan nilai skala dengan menggunakan rumus:

$$SV = \frac{(Density\ at\ Lower\ Limit) - (Density\ at\ Upper\ Limit)}{(Area\ Below\ Upper\ Limit) - (Area\ Below\ Lower\ Limit)}$$

Menghitung skor hasil transformasi untuk setiap pilihan jawaban dengan menggunakan rumus:

$$Y = SV+(k)$$

$$K = 1+(SVmin)$$

Peneliti menggunakan media komputerisasi dengan menggunakan *Microsoft excel* untuk memudahkan proses perubahan data dari skala ordinal ke skala interval.

3.5.1.3 Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono (2019:206) bahwa: “Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.” Dalam analisis deskriptif penulis melakukan pembahasan mengenai rumusan masalah yang sudah dikemukakan pada bab 1 sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Kota Bandung dan Kota Cimahi.
2. Bagaimana Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Kota Bandung dan Kota Cimahi.
3. Bagaimana Perolehan Opini Audit Pemerintah pada Pemerintah Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Kota Bandung dan Kota Cimahi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan skala *likert*, karena skala *likert* umum digunakan dalam kuesioner dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam suatu penelitian.

Menurut Sugiyono (2019:146) menyatakan:

“skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.”

Jawaban dari setiap item instrumen yang menggunakan skala *likert* mempunyai gradasi dari sangat positif sampai negatif, yang dapat berupa kata-kata lain antara lain:

Tabel 3. 7
Skor kuesioner berdasarkan skala *likert*

No	Jawaban	Pertanyaan	
		Positif	Negatif
1	Sangat setuju/selalu/sangat positif	5	1
2	Setuju/sering/positif	4	2
3	Ragu-ragu/kadang-kadang/netral	3	3
4	Kurang setuju/jarang/Kurang positif	2	4
5	Tidak setuju/tidak pernah/Tidak Positif	1	5

Sumber: Sugiyono dimodifikasi (2019:147)

Dalam operasionalisasi variabel, semua variabel diukur oleh instrument pengukur dalam bentuk kuesioner yang memenuhi pertanyaan-pertanyaan tipe skala *likert*. Untuk menilai variabel X dan variabel Y, maka analisis yang digunakan berdasarkan rata-rata (*mean*) dari masing-masing variabel. Rumus rata-rata (*mean*) adalah sebagai berikut:

$$\text{variabel X, } Me = \frac{\sum x^i}{n}$$

$$\text{variabel Y, } Me = \frac{\sum y^i}{n}$$

Keterangan:

Me = Rata-rata

Σx^i = Jumlah nilai X ke -i sampai ke-n

Σy^i = Jumlah nilai Y ke-i sampai ke-n

n = Jumlah rata-rata

Setelah rata-rata dari masing-masing variabel didapatkan, kemudian dibandingkan dengan kriteria yang peneliti tentukan berdasarkan nilai terendah dan nilai tertinggi dari hasil kuesioner. Nilai terendah dan nilai tertinggi tersebut peneliti ambil banyaknya pernyataan dalam kuesioner dikalikan dengan skor terendah 1 dan skor tertinggi 5 dengan menggunakan skala *likert*. Teknik skala *likert* dipergunakan untuk melakukan pengukuran atas jawaban yang diajukan kepada responden penelitian dengan memberikan skor pada setiap item jawaban. Setelah mengetahui kriteria jawaban kuesioner, langkah selanjutnya adalah peneliti akan menemukan panjang interval masing-masing dengan cara:

$$\frac{\text{Nilai tertinggi} - \text{nilai terendah}}{\text{jumlah kriteria}}$$

Dengan demikian, maka akan dapat ditentukan panjang interval kelas masing-masing variabel sebagai berikut:

a. Variabel Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (X₁)

Untuk menilai variabel Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan banyak item pertanyaan kuesioner adalah 17 pertanyaan, sehingga:

$$\text{Nilai terendah} \quad : 1 \times 17 = 17$$

$$\text{Nilai tertinggi} \quad : 5 \times 17 = 85$$

$$\text{Perhitungan kelas interval} = \frac{85-17}{5} = 13,6$$

Maka, kriteria kelas untuk Variabel penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 8
Kriteria Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

Rentang Nilai	Kriteria
17-30,60	Tidak Diterapkan
30,61-44,20	Kurang Diterapkan
44,21-57,80	Cukup Diterapkan
57,81-71,40	Diterapkan
71,41-85	Sangat Diterapkan

b. Variabel Kualitas Laporan Keuangan pemerintah Daerah (x₂)

Untuk menilai variabel Kualitas Laporan Keuangan pemerintah Daerah dengan banyak item pertanyaan kuesioner adalah 15 pertanyaan, sehingga:

$$\text{Nilai terendah} \quad : 1 \times 15 = 15$$

$$\text{Nilai tertinggi} \quad : 5 \times 15 = 75$$

$$\text{Perhitungan kelas interval} = \frac{75-15}{5} = 12$$

Maka, kriteria kelas untuk variabel penerapan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 9
Kriteria Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Rentang Nilai	Kriteria
15-27	Tidak Berkualitas
27,01-39	Kurang Berkualitas
39,01-51	Cukup Berkualitas
51,01-63	Berkualitas
63,01-75	Sangat Berkualitas

c. Variabel Perolehan Opini Audit Pemerintah

Untuk menilai variabel Perolehan opini Audit Pemerintah dengan banyak item pertanyaan kuesioner adalah 20 pertanyaan, sehingga:

Nilai terendah : $1 \times 20 = 20$

Nilai tertinggi : $5 \times 20 = 100$

Perhitungan kelas interval = $\frac{100-20}{5} = 16$

Maka, kriteria kelas untuk variabel perolehan Opini Audit Pemerintah adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 10
Perolehan Opini Audit Pemerintah

Rentang Nilai	Kriteria
20-36	Tidak Baik
36,01-52	Kurang Baik
52,01-68	Cukup Baik
68,01-84	Baik
84,01-100	Sangat Baik

3.5.1.4 Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif adalah analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik. Penelitian ini dilakukan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel-variabel yang diteliti. Verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode verifikatif untuk mengetahui hubungan yang bersifat sebab akibat antara variabel independen dengan variabel dependen yaitu:

1. Seberapa besar pengaruh Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah terhadap perolehan opini audit pemerintah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Kota Bandung dan Kota Cimahi.
2. Seberapa besar pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Perolehan Opini Audit Pemerintah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Kota Bandung dan Kota Cimahi.

3. Seberapa besar pengaruh Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terhadap Perolehan Opini Audit Pemerintah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Kota Bandung dan Kota Cimahi.

3.5.1.4.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda yaitu metode statistik umum yang digunakan untuk meneliti hubungan variabel-variabel independen (X) secara simultan dengan variabel dependen (Y). analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Perolehan Opini Audit pemerintah, dengan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana:

Y = Variabel Terikat (Perolehan opini Audit Pemerintah)

a = Bilangan Konstanta

$\beta_1 \beta_2$ = Koefisien Regresi

X₁ = Variabel Bebas (Penerapan PPK BLUD)

X₂ = Variabel Bebas (Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)

e = Variabel Tidak Diteliti

3.5.1.4.2 Analisis Koefisien Korelasi

Analisis Koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui korelasi antara variabel independen secara keseluruhan dengan variabel dependen. Dinyatakan dalam bentuk positif dan negatif, sedangkan kuat dan lemahnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi.

Menurut Sugiyono (2019:246) adapun rumus dari korelasi adalah sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{\Sigma xy}{\sqrt{(\Sigma x^2)(\Sigma y^2)}}$$

Keterangan:

r_{xy} = Koefisien Korelasi

Σxy = Jumlah skor total item

Σx^2 = Jumlah Kuadrat Skor Total Variabel Independen

Σy^2 = Jumlah Kuadrat Skor Total Variabel dependen

Besarnya harga koefisien korelasi akan berada dalam interval -1 dan $+1 \leq r \leq y$ yaitu dengan ketentuan untuk r adalah sebagai berikut:

1. Jika $r = 1$ atau mendekati, maka dikatakan bahwa dua variabel tersebut mempunyai hubungan yang kuat dan positif.
2. Jika $r = -1$ atau mendekati, maka dikatakan bahwa dua variabel tersebut mempunyai hubungan yang kuat dan negative.
3. Jika $r = 0$ atau mendekati, maka dikatakan bahwa dua variabel tersebut tidak berkorelasi atau berhubungan.

Adapun untuk melihat hubungan korelasi, peneliti menggunakan analisis yang dikemukakan oleh sugiyono (2019:248) sebagai berikut:

Tabel 3. 11
Interpretasi Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Tidak Kuat
0,20 – 0,399	Kurang Kuat
0,40 – 0,599	Cukup Kuat
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2019:248) dimodifikasi

3.5.2 Rancangan Uji Hipotesis

3.5.2.1 Penetapan Hipotesis Nol (H_0) dan Hipotesis Alternatif (H_a)

Menurut Sugiyono (2019:99):

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.”

Rancangan pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui korelasi yang dalam hal ini adalah korelasi Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Perolehan Opini Audit Pemerintah dengan menggunakan perhitungan variabel. Berdasarkan rumusan masalah, maka diajukan hipotesis sebagai jawaban sementara yang akan diuji dan dibuktikan kebenarannya. Rumusan hipotesis adalah sebagai berikut:

$H_0: \beta_1 \neq 0$: Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD tidak berpengaruh terhadap Perolehan Opini Audit Pemerintah.

- Ha1: $\beta_1 = 0$) : Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD berpengaruh terhadap Perolehan Opini Audit Pemerintah.
- H02: $\beta_2 \neq 0$) : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Perolehan Opini Audit Pemerintah.
- Ha2: $\beta_2 = 0$) : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Perolehan Opini Audit Pemerintah.
- H04: $\beta_3 \neq 0$) : Tidak terdapat pengaruh Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara simultan terhadap Perolehan Opini Audit Pemerintah.
- Ha4: $\beta_3 = 0$) : Terdapat pengaruh Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara simultan terhadap Perolehan Opini Audit Pemerintah

3.5.2.2 Uji Parsial (Uji t)

Uji t berarti melakukan pengujian terhadap koefisien secara parsial. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi peranan variabel independen terhadap variabel dependen diuji dengan uji- t satu, taraf kepercayaan 95%, kriteria pengambilan keputusan untuk melakukan penerimaan atau penolakan setiap hipotesis adalah dengan cara melihat signifikansi harga t -hitung setiap variabel independen atau membandingkan nilai t -hitung dengan nilai yang ada pada t -tabel, maka H_0 diterima dan sebaiknya t -hitung tidak signifikan dan berada dibawah t -tabel, maka H_0 ditolak. Uji t atau parsial ini untuk melihat :

1. Pengaruh Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD terhadap Perolehan Opini Audit Pemerintah
2. Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Perolehan Opini Audit Pemerintah

Adapun langkah-langkah dalam melakukan uji t adalah sebagai berikut:

1. Menentukan model keputusan dengan menggunakan statistic uji t , dengan melihat asumsi sebagai berikut:
 - a. Interval keyakinan $\alpha = 0,05$
 - b. Derajat kebebasan = $n-k-1$
 - c. Kaidah keputusan: Tolak H_0 (terima H_a), jika $t_{hitung} > t_{97aria}$

Terima H_0 (tolak H_a), jika $t_{hitung} < t_{table}$

Apabila H_0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat suatu pengaruh atau tidak berpengaruh, sedangkan apabila H_0 ditolak maka pengaruh variable independen terhadap dependen adalah signifikan.

2. Menentukan t_{hitung} dengan menggunakan statistic uji t , dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

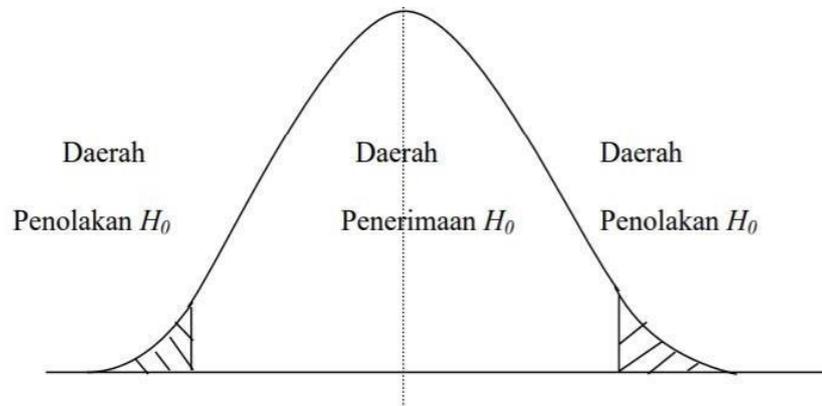
Keterangan:

r = koefisien korelasi

t = nilai koefisien korelasi dengan derajat bebas (dk) = $n-k-1$

n = jumlah sampel

3. Membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel}



Gambar 3. 2 Uji t

(Sumber: Sugiyono, 2016:185)

Distribusi t ini ditentukan oleh derajat kesalahan $dk = n-2$. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. H_0 ditolak jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $sig. < \alpha$
- b. H_0 diterima jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ atau $sig. > \alpha$

Apabila H_0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruhnya tidak signifikan, sedangkan apabila H_0 ditolak maka pengaruh variable independen terhadap dependen adalah signifikan. Agar lebih memudahkan peneliti dalam melakukan pengolahan data, akan dilakukan dengan menggunakan alat bantu aplikasi *Software IBM SPSS Statisticsts 22* agar pengukuran data yang dihasilkan lebih akurat.

3.5.2.3 Uji Simultan (Uji F)

Menurut Sugiyono (2017:257), pengujian hipotesis dapat digunakan rumus signifikan korelasi ganda sebagai berikut:

$$F_n = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/n - k - 1}$$

Keterangan:

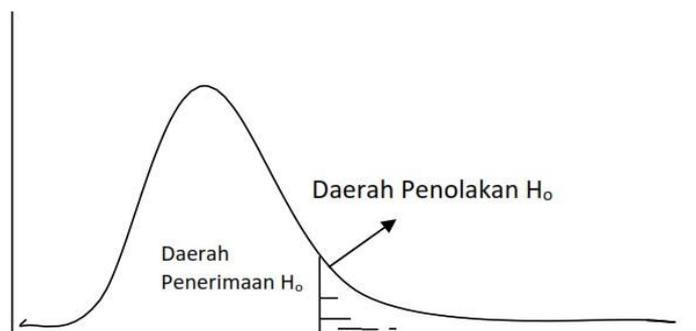
F_n = Nilai Uji F

R = Koefisien korelasi berganda

k = Jumlah variable independent

n = Jumlah anggota sampel

Setelah mendapat nilai F_{hitung} ini, kemudian dibandingkan dengan nilai F_{tabel} dengan tingkat signifikan sebesar 5% atau 0,05. Artinya kemungkinan besar dari hasil kesimpulan memiliki probabilitas 95% atau korelasi kesalahan sebesar 5%.



Gambar 3. 3 Uji F

Sumber: Sugiyono (2016:187)

Dalam uji F tingkat signifikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,95 atau 95% dengan $\alpha = 0,05$ atau 5%. Bisa juga dengan *degree freedom* = $n-k-1$ dengan kriteria sebagai berikut:

- a. H_0 ditolak dan H_a diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai $Sig < \alpha$
- b. H_0 diterima dan H_a ditolak jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau nilai $Sig > \alpha$

Jika terjadi penerimaan H_0 , maka dapat diartikan sebagai tidak signifikannya model regresi berganda yang diperoleh sehingga mengakibatkan tidak signifikan pula pengaruh dari variable-variabel bebas secara simultan terhadap variable terikat.

3.6 Rancangan Kuisisioner

Menurut Sugiyono (2019:199) kuisisioner adalah:

“Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk di jawabnya. Kuisisioner dapat berupa pertanyaan/ pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet.”

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis kuisisioner tertutup yaitu kuisisioner yang dibagikan kepada setiap responden dengan pertanyaan yang mengharapkan jawaban singkat atau responden dapat memilih salah satu jawaban alternatif dari pertanyaan yang telah disediakan. Kemudian dalam penelitian ini teknik pemberian skor yang digunakan dalam kuisisioner adalah teknik skala *likert*.

Berdasarkan judul penelitian, kuisisioner akan dibagikan kepada Pegawai yang bekerja pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Dinas Kesehatan

Kota Bandung, Dinas Kesehatan Kota Cimahi, BKAD Kabupaten Bandung, BPKA Kota Bandung Dan BPKAD Kota Cimahi. Kuesioner ini berisikan pertanyaan mengenai variabel Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Perolehan Opini Audit Pemerintah sebagaimana yang tercantum pada operasionalisasi variabel. Semua pertanyaan kuesioner ini ada 52 item yang terdiri dari 17 pertanyaan untuk Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (X_1), 15 pertanyaan kuesioner untuk Penerapan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (X_2), dan 20 pertanyaan untuk Perolehan Opini Audit Pemerintah Daerah (Y).